

**MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA  
MELALUI MUSYAWARAH DESA BERDASARKAN PERATURAN  
BUPATI KAMPAR NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DESA DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN  
SALO KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**M. ANDRE PRATAMA**

**11627104048**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1441 H/2020 M**

**MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA  
MELALUI MUSYAWARAH DESA BERDASARKAN PERATURAN  
BUPATI KAMPAR NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DESA DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN  
SALO KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



**Oleh:**

**M. ANDRE PRATAMA  
11627104048**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1441 H/2020 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar"* yang ditulis oleh:

Nama : M. ANDRE PRATAMA

NIM : 11627104048

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2020

Pembimbing Skripsi



Muslim, S.Ag, SH, M.Hum  
NIP. 19720505 201411 1 002





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR"* yang ditulis oleh :

Nama : **M. ANDRE PRATAMA**  
 NIM : 11627104048  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 September 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua

**Dr. H. Hajar, M,Ag**

Sekretaris

**H. Henrizal Hadi, Lc, M.A**

Penguji I

**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Penguji II

**Dr. Muhammad Darwis, SH, MH**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005

## ABSTRAK

**M. Andre Pratama, (2020): Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar**

Penelitian ini membahas tentang mekanisme penyusunan rencana pembangunan desa berdasarkan peraturan bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 pada Pasal 23 yang seharusnya melaksanakan musyawarah desa itu ada Badan Permusyawaratan Desa. Namun pada kenyataannya di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tidak dilakukan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa tetapi dilakukan oleh Pemerintahan Desa yang tidak sesuai dengan apa yang di perintahkan pada dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa pada Pasal 23.

Populasi dalam penelitian ini yaitu Camat Salo, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sipungguk, maka penulis mengambil sampel dengan teknik *Purposive Sampling*. Penelitian ini merupakan penelitian yang dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Serta Faktor-Faktor tidak terlaksananya Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan Mekanisme penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ini dilakukan oleh pemerintahan desa bukan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Camat Salo sudah melakukan sosialisasi terhadap peraturan bupati tersebut. Melihat dari keterangan dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak berjalan seiringan dalam hal pelaksanaan musyawarah desa ini disebabkan kepala desa di Desa Sipungguk ingin menguasai secara penuh seluruh yang ada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu sampai kepada manusia berilmu dan beriman.

Dengan izin dan rahmat yang Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Mekanisme penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”**. Memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Ayahanda Heri Indra, SH dan Ibunda Rosydiana Rasyid, A.Md tercinta dan tersayang yang telah bersusah payah mendidik dan menjaga penulis dari kecil



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga saat ini, selalu memberikan nasehat dan masukan, dan senantiasa mendoakan penulis disetiap waktu agar dapat meraih cita-cita serta doa dan ridho dari ayah dan ibu yang selalu penulis harapkan.

Adik M. Alfu Iskandar dan NurAtiyah Azka tersayang yang senantiasa memberikan semangat dan mendoakan kelancaran untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Rektor UIN Suska Riau Prof. DR. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag beserta pembantu Dekan I, II, dan III yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.
5. Bapak Firdaus S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, S.H, M.Hum yang telah memberikan bantuan kepada penulis menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
6. Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide dan saran serta selalu sabar kepada penulis dalam penelitian ini.
7. Ibu Lysa Anggraini, S.H, M.H selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Camat Salo, Kepala Desa Sipungguk, Badan Permusyawaratan Desa, dan seluruh staff jajaran yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan banyak membantu penulis dalam mendapatkan informasi.

Bapak/ibu dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Pimpinan pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

11. Sahabat perjuangan susah senang yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman penulis yang senasib dan seperjuangan yaitu angkatan 2016 khususnya kelas IH C.

12. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robbal'alamin.

Pekanbaru, 12 Juli 2020  
Penulis

**M. Andre Pratama**  
**NIM. 11627104048**





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Kabupaten Kampar.....	16
B. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sipungguk Kecamatan Salo .....	22
C. Keadaan Wilayah .....	22
D. Stuktur Pemerintahan Desa Sipungguk.....	27
<b>BAB III TINJAUAN TEORI</b>	
A. Pemerintahan Daerah .....	32
B. Pemerintahan Desa.....	37
C. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa .....	38
D. Keanggotaan dan Kelembagaan BPD .....	39
E. Pengertian Pembangunan Desa .....	42
F. Peraturan Daerah.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Mekanisme penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.....	47
B. Kendala dalam Mekanisme Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa pada Pasal 23 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.....	48
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

- Hak Cipta Ditangguhkan UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi Dan Sample.....	12
Tabel II.1	Luas Desa Sipungguk.....	23
Tabel II.2	Batas Desa.....	23
Tabel II.3	Panjang Keseluruhan Jalan Desa .....	24
Tabel II.4	Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	24
Tabel II.5	Jumlah Mata Pencarian Berdasarkan Profesi.....	24
Tabel II.6	Jumlah Produk Domestik Desa.....	25
Tabel II.7	Jumlah Sarana Pendidikan .....	25
Tabel II.8	Jumlah Wajib Belajar 9 Tahun.....	25
Tabel II.9	Jumlah Komplek Kantor Pemerintahan .....	26
Tabel II.10	Jumlah Sarana Umum .....	26
Tabel II.11	Jumlah Sarana Olahraga dan Kepemudaan.....	25



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*) sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*rechtsidee*) yang di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional.<sup>1</sup>

Di era Otonomi Daerah yang memberlakukan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kuasa Kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang didasarkan pada asas, sistem, tujuan, dan landasan hukum.<sup>2</sup> Sebagai daerah otonom, pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu tujuan Peraturan

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986), h. 538.

<sup>2</sup> Monterio, Josef Mario, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta Pustaka Yustisia, 2016), h. 1.

1. Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
  2. Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh DPRD bersama Kepala Daerah harus memperhatikan salah satu aspek yaitu aspek keterbukaan, bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah diperlukan adanya keterbukaan bagi masyarakat, baik itu akademisi atau praktisi agar dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, persiapan, dan penyusunan untuk memberikan masukan atau pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
- Pembentukan Peraturan Daerah itu merupakan suatu pekerjaan yang sulit, karena dituntut kesempurnaan seperti dalam hal sistematis, tatanan bahasa, istilah dan juga banyaknya berbagai jenis materi yang akan diatur sesuai dengan kebutuhan. Suatu peraturan yang baik dalam persiapan pembuatannya membutuhkan pengetahuan mendalam dari materi yang akan diatur memiliki kemampuan untuk menemukan inti dari fakta-fakta yang sudah tumbuh sejak lama serta mengungkap ke dalam bentuk peraturan yang singkat dan dengan bahasa yang jelas.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
- 
- <sup>3</sup>*Ibid*, h. 67.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Prinsip Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dalam penjelasannya di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.<sup>4</sup>
- Melalui penyebaran Peraturan Daerah yang telah disahkan kepada publik di harapkan bahwa masyarakat dalam lingkup nasional dan regional dapat mengetahui segala peraturan yang berlaku di wilayahnya, sehingga mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang terlindungi hukum dengan mengedepankan aspek keadilan hukum tanpa adanya kasus penegakan hukum yang terbentur dengan asas fiksi hukum. Terlebih dengan masyarakat di daerah yang lebih sulit untuk mengakses informasi di bandingkan dengan masyarakat di wilayah kota-kota besar di Indonesia ataupun kota metropolitan, sehingga penyebaran melalui metode selain media elektronik dan melalui sosialisasikan Peraturan Daerah harus di maksimalkan oleh Pemerintah Daerah.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>4</sup> Syaukani Dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), 183.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut: (i) membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa; (ii) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; (iii) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; (iv) membentuk panitia pemilihan kepala Desa; (v) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; (vi) menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD); (vii) dalam hal anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mengusulkan pemberhentian kepala Desa yang disebabkan pelanggaran tugas dan fungsinya. Maka Bupati dapat memberhentikan tanpa usulan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>5</sup>

Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya.

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada Pasal 81 Berbunyi “(1) Badan Permasyarakatan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya. (3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: (a) Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan (b) Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa. (4) Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permasyarakatan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”. Memberikan dampak positif terhadap pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa sesuai aturan perundang-undangan.

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, hal ini jelas diatur lebih rinci dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa yang mana diatur pada Pasal 23 “(1) BPD menyelenggarakan Musdes berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.”. Dalam hal ini jelas diatur tugas Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan musyawarah desa bersama pemerintahan desa. Untuk pembangunan desa 1 (satu) kedepan yang

menjadi faktor utama bisa menampung aspirasi dan menyalurkan ke pemerintahan Desa dan dibahas bersama-sama dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) terkhusus di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Namun pada kenyataannya di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tidak dilakukan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa oleh Badan Permasyarakatan Desa tetapi dilakukan oleh Pemerintahan Desa yang tidak sesuai dengan apa yang di perintahkan pada dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa pada Pasal 23 “(1) BPD menyelenggarakan Musdes berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa”.di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”.

Dengan adanya permasalahan diatas menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan ini dengan Judul, Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa pada Pasal 23 “(1) BPD menyelenggarakan Musdes berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa”.di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”.

Sedangkan penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa bertujuan membantu tugas BPD sebagaimana yang di perintahkan oleh Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Batasan Masalah

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu khusus Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.

Pada Pasal 81 Berbunyi “(1) *Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.* (2) *Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.* (3) *Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: (a) Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan (b) Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.* (4) *Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)*”. Di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian –uraian latar belakang tersebut di atas , maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?

Apa saja kendala dalam mekanisme Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa pada Pasal 23 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa pada Pasal 23 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa di Desa Sipungguk.

## E. Manfaat Penelitian

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Manfaat secara teoritis:

- a. Untuk menambah referensi, bahan literature atau pustaka, khususnya dalam memahami peran pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Desa.
- b. Sebagai bahan pertimbangan masukan bagi penulis dari hasil penelitian ini dan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut.

### 3. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam pembuatan Peraturan Bupati, khususnya dalam tahap penyebarluasan Peraturan Bupati kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



## F. Metode Penelitian

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan.<sup>6</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi di adakan penelitian ini adalah di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, dengan alasan dan pertimbangan mengambil lokasi ini, karena penulis melihat di Desa Sipungguk Kecamatan Salo tidak dilakukan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa setiap tahunnya.

### 3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.<sup>7</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relavan dengan kebutuhan penelitian.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52.  
<sup>7</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.30.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,<sup>8</sup> yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.<sup>9</sup>

Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>10</sup> Teknik pengambilan sampel dipenelitian ini adalah purposive sampling.

<sup>8</sup>Ibid, h.31.

<sup>9</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.118.

<sup>10</sup>Ibid, h.119.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sample**

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1	Camat Salo	1 Orang	1 Orang	100%
2	Kepala Desa	1 Orang	1 Orang	100%
3	Kepala Urusan Pemerintahan Desa	1 Orang	1 Orang	100%
4	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	9 Orang	2 Orang	23%
<b>Jumlah</b>		<b>12 orang</b>	<b>5 orang</b>	<b>42%</b>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati,<sup>11</sup> dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106.



## Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam Mensosialisasikan Peraturan Bupati Kampar di Kabupaten Kampar.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>12</sup>Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), 53.

## G. Sistematika Penulisan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab di uraikan dalam sub-bab, sehingga antara satu bab dengan yang bab lainnya merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematikan Penulisan.

### **BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan di uraikan gambaran Lokasi Penelitian, Sejarah Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Visi dan Misi Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Stuktur Pemerintahan Desa dan wilayah Geografis Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

### **BAB III: TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini akan di uraikan Teori-Teori tentang Badan Permusyawaratan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa dan gambaran Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.



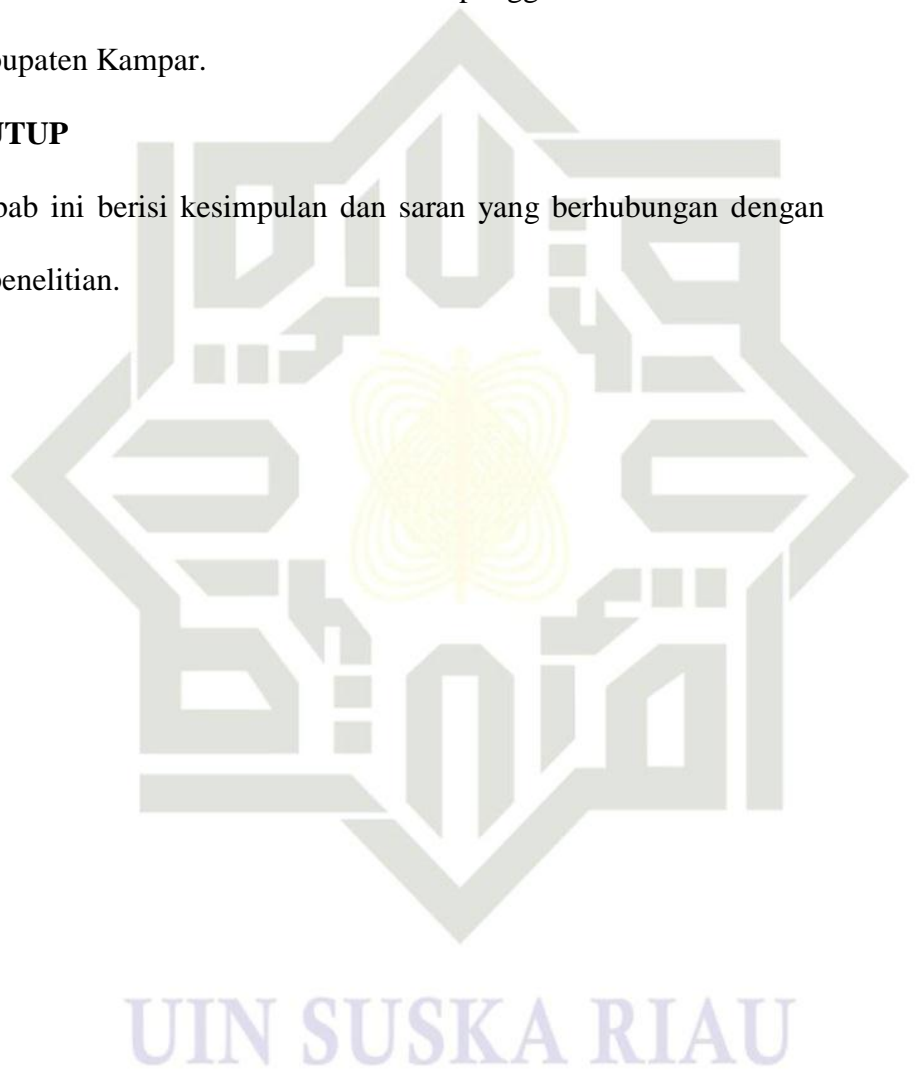
## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian. meliputi pembahasan pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

## **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau lahir pada tanggal 06 Februari 1950, hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 1999. dengan rujukan Peraturan Undang-undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah, Nomor: 3/DC/STG/50 tanggal 06 Februari 1950. Dan secara Administratif Pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958. Jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah panjang dengan Limo kotonya, dimana Daerah ini dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di Sumatera Barat, semasa Pemerintahan sistem adat kenegerian yang dipimpin oleh datuk atau ninik mamak, Pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah Pemerintahan Andiko 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkai (Kampar Kiri), Daerah Limo Koto (Kuok, Bagkinang, Salo, Airtiris dan Rumbio), X Koto di Tapung (Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), III Koto Sibalingbong (Siabu), Rokan IV Koto dan Pindu Rayo.

Adat hingga bahasa sehari-hari hampir mirip dengan Minang kabau dan demikian pula semacam seni budaya, alat musik tradisional (Calempong dan Oguong) dan beberapa kebiasaan lainnya. Kampar sebagai Kabupaten terluas di Provinsi Riau hingga hari ini (2008) memiliki luas 27.908.32 Km<sup>2</sup>, dengan beberapa kali pemekaran wilayah, seperti lahirnya Kabupaten

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelalawan dan Rokan Hulu, sementara jumlah penduduknya berkisar 750.000 jiwa/km<sup>2</sup> dengan batasan-batasan wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Lima Puluh Koto (Sumatera Barat).

Kampar memiliki catatan sejarah yang membuktikan Asal-usul dan identitas diri masyarakatnya dengan adanya Situs-situs Kerajaan seperti terdapat di Darussalam. Pemerintah Darussalam di Kabupaten Kampar Riau sampai saat ini masih menyisakan kejayaannya. Hal itu bisa terlihat dari masih berdirinya situs bersejarah Istana Kerajaan Darussalam hingga kini. Istana Kerajaan Darussalam berdiri di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Tidak ada keterangan pasti tentang kapan raja Darussalam pertama berkuasa. Literatur sejarah Melayu pun tidak banyak menjelaskan asal-usul Kerajaan di pinggir Sungai Kampar ini. Hanya para tokoh adat di Gunung Sahilan memperkirakan Kerajaan Darussalam diperkirakan berdiri sekitar tahun 1901.

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedudukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan Minanga Tanvar dapat bermaksud dengan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penemuan dua Sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Mera Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Sedangkan Pada zaman Belanda pembagian wilayah secara administrasi dan Pemerintahan masih berdasarkan persekutuan Hukum Adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas yakni :

1. Desa Swapraja meliputi: Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan, yang merupakan suatu Raja-raja dibawah district loofd Pasir Pengaraian yang dikepalai oleh seorang Belanda yang disebut Kontroleur (Kewedanaan) Daerah/wilayah yang masuk Residensi Riau.
2. Wilayah Bangkinang: membawahi Batu Bersurat, Kuok, Salo, Bangkinang dan Air Tiris termasuk Residensi Sumatera Barat, karena susunan masyarakat hukumnya sama dengan Daerah Minang Kabau yaitu Nagari, Koto dan Teratak.
3. Desa Swapraja Senapelan/Pekanbaru meliputi: wilayah Kampar Kiri Senapelan dan Swapraja Gunung Sahilan, Singingi sampai Kenegerian Tapung Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak (Residensi Riau).
4. Desa Swapraja Pelalawan meliputi: Bunut, Pangkalan Kuras, Serapung dan Kuala Kampar (Residensi Riau), Situasi genting antara Republik Indonesia dengan Belanda saat itu tidak memungkinkan untuk diresmikannya Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah pada bulan November 1948.



Berdasarkan pembagian tersebut diketahui bahwa tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokan wilayah Kabupaten Kampar. Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan Pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konfrensi Bundar. Tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah Nomor: 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan Pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Otonomi Daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya Ketetapan Gubernur Sumatera Tengah Nomor: 3/dc/stg/50 Tanggal 6 Februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tingkat II Kampar Nomor: 02 Tahun 1999 tentang hari jadi Daerah tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 Nomor: 01 Tanggal 5 Februari 1999 Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam lembaran Negara tahun 1999 Nomor Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Dua Kabupaten baru tersebut yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bupati wilayah I dan Bupati Wilayah II.

### 1. Sejarah Kecamatan Salo

Kecamatan Salo adalah salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, keberadaan Kecamatan Salo sangat strategis dari segi geografis yang sangat dekat dengan ibu kota kabupaten dan berada di lintasan jalan negara yang menghubungkan Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat.

Potensi wilayah yang cukup kaya serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai membuat Kecamatan Salo merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk 128 jiwa/km<sup>2</sup> yang menduduki nomor 9 terpadat di Kabupaten Kampar.

Kecamatan Salo merupakan pemekaran dari Kecamatan Bangkinang (sekarang Kecamatan Bangkinang Kota) dan Kecamatan Bangkinang Barat (sekarang Kecamatan Kuok) hal ini di atur dalam Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor : 22 Tahun 2003 tentang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Salo, Kampar Utara, Kampar Timur, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

## 2. Letak Geografi Kecamatan Salo

Kantor Camat Salo merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kampar ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar. Kecamatan Salo merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar yang luas wilayahnya menurut pengukuran Kantor Camat Salo adalah  $\pm 207,83$  Km, yang terdiri dari 6 Desa yaitu :

- a. Desa Salo
- b. Desa Salo Timur
- c. Desa Ganting
- d. Desa Ganting Damai
- e. Desa Sipungguk
- f. Desa Siabu

Adapun batas wilayah Kecamatan salo sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Tapung
- Sebelah Timur : Kecamatan Bangkinang Kota
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kampar Kiri
- Sebelah Barat : Kecamatan Kuok.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sipungguk Kecamatan Salo**

Pada zaman dahulu Desa Sipungguk terletak di dua buah sungai yakni Sungai Sipungguk dan Sungai Kampar dimana sepanjang sungai Sipungguk terdapat sebuah kampung/dusun bernama Dusun Sipungguk dan Dusun Pulau Mesjid. Sungai Sipungguk tersebut bermuara ke Sungai Kampar. Dimana di Desa Sipungguk memiliki empat dusun yaitu:

1. Dusun Teratak
2. Dusun Sipungguk
3. Dusun Muara Danau
4. Dusun Pulau Mesjid

Di sepanjang sungai Kampar sampai muara sungai Sipungguk terdapat sebuah kampung /dusun yang diberi nama sipungguk setelah Kenegerian Salo dimekarkan menjadi enam desa yakni Salo, Sipungguk, Ganting, Siabu, Ganting Damai, dan Salo Timur. Pada tahun 1978 Desa Sipungguk adalah bagian dari desa Salo yang bernama kampung Sipungguk.

## **C. Keadaan Wilayah**

### **1. Kondisi Geografis**

Desa Sipungguk masuk dalam wilayah kecamatan Salo dengan luas wilayah 2642 Ha, dimana 90% berupa daratan yang bertopografi dataran, dan 60% dataran dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk perkebunan, persawahan tadah hujan. Iklim Desa Sipungguk sebagaimana desa-desa lain di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Sipungguk kecamatan Salo. Jarak Desa Sipungguk ke ibukota kecamatan 7 km dengan waktu tempuh 50 menit, jarak dengan ibukota kabupaten 6 km dengan waktu tempuh 45 menit dan dengan ibukota provinsi 70 km dengan waktu tempuh 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan umum dan dengan kemudahan sarana transportasi umum yang dapat ditemui setiap hari.

## 2. Kondisi Demografis

**Tabel II.1**  
**Luas Desa Sipungguk**

No	Luas Desa	Luas Lahan
1.	Luas Desa Sipungguk	206,4 Ha
2.	Kantor Desa	0,60 Ha
3.	Tanah Kuburan	15 Ha
4.	Tanah Lapangan	2 Ha
5.	Tanah Mesjid/ Mushallah	4 Ha

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

**Tabel II.2**  
**Batas Desa**

No	Batas	Berbatasan
1.	Utara	Dengan Kecamatan Tapung
2.	Timur	Dengan Kelurahan Pulau
3.	Selatan	Dengan Desa Salo dan Salo Timur
4.	Barat	Dengan Desa Ganting Damai

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat Desa Sipungguk sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Tapung, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pulau, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Salo dan Salo Timur, sedangkan sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Ganting Damai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.3**  
**Panjang Keseluruhan Jalan Desa**

No	Jalan	Panjang Jalan
1.	Panjang Jalan Kabupaten	50 km
2.	Panjang Jalan Desa	35 km
3.	Panjang Jalan Seminisasi	15 km

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

**Tabel II. 4**  
**Kondisi Ekonomi Masyarakat**

No	Keseluruhan	Jumlah
1.	Jumlah angkatan Kerja	350 orang
2.	Jumlah Usia Sekolah	504 orang
3.	Jumlah Ibu Rumah Tangga	400 orang
4.	Jumlah Pekerja Penuh	250 orang
5.	Jumlah Yang Tidak Menentu	100 orang
6.	Jumlah Rumah Tangga Berkebun	125 orang
7.	Jumlah Rumah Tangga Buruh Tani	150 orang
8.	Jumlah Anggota Rumah Tangga Buruh Tani	50 orang

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

**Tabel II.5**  
**Jumlah Mata Pencanharian Berdasarkan Profesi**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pedagang	30 orang
2.	Pengrajin	5 orang
3.	PNS/TNI/POLRI	36 orang
4.	Penjahit	15 orang
5.	Montir	3 orang
6.	Sopir	7 orang
7.	Karyawan Swasta	15 orang
8.	Tukang kayu	4 orang
9.	Tukang Batu	15 orang
10.	Guru Swasta/Honorar	50 orang

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.6**  
**Jumlah Produk Domestik Desa**

No	Produk	Luas & Jumlah
1.	Tamanan karet masyarakat	50 Ha
2.	Tanaman sawit	10 Ha
3.	Tanaman padi lading	35 Ha
4.	Tanaman palawija	-
5.	Tanaman jagung	-
6.	Tanaman lainnya	2 Ha
7.	Ternak kerbau/sapi	169 Ekor
8.	Ternak kambing/domba	35 Ekor
9.	Ikan sungai	-

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

**Tabel II.7**  
**Jumlah Sarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	1 unit
2.	MDA/TPA	4 unit
3.	SDN	2 unit
4.	SMP/MTS	1 unit
5.	SMA/MA	1 unit
6.	Jumlah Buta Huruf	3 orang
7.	Tidak Tamat SD	394 orang
8.	Tamat SD	525 orang
9.	Tamat SLTP	350 orang
10.	Tamat SLTA	249 orang
11.	DI/DII/DIII	51 orang
12.	S1	47 orang
13.	S2	5 orang
14.	SLB	2 orang

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupate Kampar Tahun 2019

**Tabel II.8**  
**Jumlah Wajib Belajar 9 Tahun**

No	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah
1.	Usia 7-15 Tahun	433 orang
2.	Masih Sekolah 7-15	230 orang
3.	Tidak Sekolah	3 orang

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.9**  
**Jumlah Komplek Kantor Pemerintahan**

No	Jumlah Bangunan	Jumlah
1.	Bangunan kantor Desa	1 unit
2.	Balai Desa	1 unit
3.	Rumah Bidan	1 unit

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

**Tabel II.10**  
**Jumlah Sarana Umum**

No	Sarana Umum	Jumlah
1.	Jumlah Masjid	4 buah
2.	Mushollah	8 buah
3.	Puskesmas Induk	1 unit
4.	Pukesmas Pembantu	1 unit

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

**Tabel II.11**  
**Jumlah Sarana Olahraga dan Kepemudaan**

No	Sarana Olahraga	Jumlah
1.	Lapangan Sepak Bola	1 buah
2.	Lapangan Volly	2 buah
3.	Lapangan Takraw	-
4.	Lapangan Badminton	-

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas,dapat dilihat kondisi demografis Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar secara keseluruhan di berbagai sektor.

### 3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sipungguk secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tadah hujan, perkebunan karet dan sawit, sebagian kecil di sektor formal seperti PNS Pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis, TNI/POLRI, dll.

#### 4. Agama

Penduduk Desa Sipungguk 100% memeluk agama Islam yang merupakan agama Islam yang dianut oleh nenek moyang sebelumnya. Oleh karena itu agama yang di anut oleh masyarakat Desa Sipungguk adalah agama Islam yang sangat menjiwai dan merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

### D. Stuktur Pemerintahan Desa Sipungguk

#### 1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan Pimpinan peneyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 Tahun, dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) oleh penduduk setempat. Kepala Desa berwenang sebagai pemimpin Desa dalam wilayah yang terdiri dari dusun-dusun dalam desa tersebut dan bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Profil Desa Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar terbagi dalam 4 (Empat Dusun), diantaranya Dusun Sipungguk yang dijabat oleh Saudara Mawardi. Pada Dusun Taratak yang dijabat oleh Saudara Afrizal Hs, Pada Dusun Muara Danau dijabat oleh Saudara Syukri. Pada Dusun Pulau Mesjid yang dijabat oleh saudara Abasrinaldi.

## 3. Sekretaris Desa

Membantu Lurah dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Perencanaan dan Program Kerja Desa, Keuangan, Administrasi, umum serta Kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Desa mempunyai tugas meliputi :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa.
- b. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretaris desa.
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris desa dan keadaan umum desa.
- d. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa.
- e. Melaksanakan unsur surat menyurat dan kearsipan dan laporan.
- f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
- g. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
- h. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- i. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
  - j. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan.
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

#### 4. Kepala Urusan Pemerintah

Tugas Kepala Urusan Pemerintah meliputi :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa.
- b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah.
- d. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
- e. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT/RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (ctt: sekarang menjadi pelindung masyarakat atau linmas).
- f. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa.
- g. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- h. Melaksanakan, mengawasi serta membina ex-tapol dan kegiatan sosial politik lainnya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Kepala Urusan Umum

Tugas Kepala Urusan Umum meliputi:

- a. Melaksanakan menerima, dan mengendalikan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
- b. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- c. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.
- d. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan milik desa.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
- f. Mencatat kekayaan inventarisasi desa.
- g. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## 6. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas Kepala Urusan Pembangunan meliputi

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa.
- b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan di desa.
- c. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.
- d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.



## 7. Kepala Urusan Keuangan

Tugas Kepala Urusan Keuangan meliputi :<sup>14</sup>

- a. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan.
- c. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh desa
- d. Melakukan administrasi keuangan desa.
- e. Merencanakan penyusunan APBDES untuk dikonsultasikan dengan BPD.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>14</sup> Propil Desa Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemerintahan Daerah

##### 1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah secara sederhana berasal dari dua kata yaitu Pemerintah dan Daerah. Selanjutnya, Pemerintah jika ditinjau dari defenisi kata (etimologi), yaitu berasal dari kata dasar kata perintah yang berarti melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh, setelah ditambah awalan “Pe” yang menjadi Pemerintah, akan berarti badan atau organisasi yang mengurus. Jika kemudian ditambah dengan akhiran “an”, maka akan menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atauperihal.<sup>15</sup>

Menurut W.S Sayre, Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.<sup>16</sup>

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD Tahun 1945 telah melahirkan berbagai produk Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun

<sup>15</sup>Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), h. 8.

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 11.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara normatif undang-undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai zamannya. Secara empiris undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya memberikan implikasi terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif lebih dominan dari kekuasaan legislative daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah, untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah, yang masing-masing untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk Kota disebut Wakil Walikota.<sup>17</sup>

## 2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di

<sup>17</sup> Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 54-55.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah setidaknya dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketiga macam asas tersebut. Namun, dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Macam-macam asas pemerintahan daerah:

a. Asas Desantralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan yang demokratis. Suatu Pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan Pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing Dalam rangka desentralisasi dibentuk Daerah otonom.

#### b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintahan pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Amrah muslimin mengartikan dekonsentrasi ialah pelimpahan dari sebagian kewenangan Pemerintah Pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Irawan Soejito mengartikan dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Sedangkan Joeniarto mengatakan dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> N i"Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 2011), h 314.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi.

#### c. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, Kota madya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.

Daerah Otonom atau Daerah Swatantra adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah ini dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Wilayah administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. Wilayah ini dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi.<sup>19</sup>

<sup>19</sup>C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 3-4.



## Pemerintahan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sanalah terbukti bahwa kesatuan masyarakat hukum, yakni warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak dan wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya demi kepentingan warga yang tinggal. Pengertian desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo adalah suatu kesatuan hukum yang didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di jelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengartikan bahwa “Pemerintahan Desa sebagai

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi Penyelenggaraan Urusan Bidang Eksekutif yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa melalui Kepala Desa dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan.

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa “Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”<sup>21</sup>

Sedangkan penyelenggaraan urusan bidang legislatif dibentuk suatu Badan Perwakilan Desa yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa sebagai wujud demokrasi.

### C. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>22</sup>

Staff administrasi Badan Permasyarakatan Desa yaitu seseorang yang diperuntukan untuk membantu tugas Badan Permasyarakatan Desa didalam administrasi surat-menyurat yang kehadirannya itu sepenuhnya mempermudah tugas Badan Permasyarakatan Desa.<sup>23</sup>

Tugas Staf Administrasi BPD Seperti dikutip berasal dari bahasa Indonesia situs Wikipedia adalah bisnis dan kegiatan administrasi yang perihal dengan organisasi kebijaksanaan untuk meraih tujuan seperti entri data, pengarsipan, pengaturan perjalanan membuat, pemesanan mengambil.<sup>24</sup>

#### **D. Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD)**

##### **1. Pengisian Berdasarkan Keterwakilan Perempuan**

- a. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses secara musyawarah atau pemilihan langsung.
- b. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permuyawaran Desa.

<sup>23</sup> Minda, Camat Salo, *Wawancara*, 10 Maret 2019, pukul 14.00 WIB.

<sup>24</sup> <https://pelatihanadministrasiperkantoran.blogspot.com/2019/10/tugas-staff-administrasi-bpd-terkini.html>, Diakses pada Tanggal 19 Juni 2020 pukul 20.41 WIB.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- c. Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
  - d. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 2) Jumlah penduduk sampai dengan 500 jiwa kebawah sebanyak 5 anggota BPD.
    - 3) Jumlah penduduk 501 jiwa sampai dengan 2500 jiwa sebanyak 7 anggota BPD.
    - 4) Jumlah penduduk 2501 jiwa ke atas sebanyak 9 anggota BPD.
    - 5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Dusun.

## 2. Pengisian Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- b. Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- c. Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- d. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan 1 (satu) orang dari jumlah anggota BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4).

- e. Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- f. Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

### 3. Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

#### a. BPD mempunyai Fungsi:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

#### b. BPD mempunyai tugas:

- 1) Menggali aspirasi masyarakat.
- 2) Menampung aspirasi masyarakat.
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat.
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- 6) Menyelenggarakan musyawarah desa.
- 7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- 9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa.
- 12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>25</sup> Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten antar kabupaten.<sup>26</sup>

Pembangunan desa memiliki peran yang cukup penting dalam proyek

<sup>25</sup> Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transparansi nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa, pasal 1 ayat 9.

<sup>26</sup> Wahjudin, dalam nurman, strategi pembangunan daerah, Jakarta, Pt.Raja grafindo persada, cetak ke-1, 2015, h.266-267.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan nasional. Karena pembangunan desa cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan desa selarasnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandarin, maju, sejahtera, dan berkeadilan.<sup>27</sup>

Adapun sebuah pembangunan desa memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan tidak hanya masalah fisik akan tetapi juga non fisik yang perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Yang mana tujuan pembangunan desa yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberi makna dalam pencapaian pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Meningkatkan keterpaduan antar bidang/ sector dan kelembagaan dalam kerangka.

<sup>27</sup> Adisamita, Rahardjo, pembangunan pedesaan dan perkotaan, Yogyakarta, graha ilmu, 2006, h.33.

## Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah.

Perda terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan daerah kabupaten/kota dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan daerah kabupaten/kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Peraturan Daerah memiliki fungsi, yaitu:

1. Instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
2. Penampung khusus dan keberagaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
3. Alat Pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.
4. Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemunculan persoalan di sekitar Perda bermasalah antara lain disebabkan oleh semangat berlebihan dari daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Ada sebagian Perda yang dipandang bermasalah karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, tetapi ada juga yang dipandang menghambat investasi ke daerah.

Kejadian ini mungkin berawal dari ketiadaan aturan operasional dari Pusat berupa peraturan pemerintahan yang mengatur kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga setiap daerah menafsirkan sendiri kewenangan yang ada pada dirinya. Apalagi Peraturan Pemerintah yang dimintakan oleh Undang-undang tersebut sebagai aturan pelaksanaannya sampai hari ini pun belum semuanya dikeluarkannya oleh pemerintah. Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dari keseluruhan Perda yang diterbitkan oleh sejumlah daerah ada beberapa Perda yang dipandang bermasalah.

Peraturan Daerah sendiri memuat materi tentang pokok-pokok penyelenggaraan Pemerintahan yang ada di daerah dengan memperhatikan ciri-ciri khusus ataupun ciri khas kedaerahan. Peraturan Daerah juga memuat tentang penjabaran yang lebih mendetail mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarki, selain itu Perda juga memuat aturan tentang pelaksanaan asas tugas pembantuan di daerah.

Materi muatan Perda di bidang tugas pembantuan ditentukan sesuai dengan jenis tugas pembantuan yang menjadi urusan rumah tangga tugas pembantuan. Perda untuk melaksanakan otonomi meliputi seluruh urusan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga otonomi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 13 dikatakan bahwa materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>28</sup>

Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 menegaskan bahwa Perda merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Setelah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menggantikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dan ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 ditegaskan dalam Pasal 13 bahwa bahwa materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan peraturan desa yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran yang lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Sudi Fahmi, *Konsistensi Hukum antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta, Total Media, 2009), h. 123.

<sup>29</sup> Abu Samah, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), h. 143.

## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian diatas yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu ”mekanisme penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Desa Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar” adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ini dilakukan oleh pemerintahan desa bukan dilakukan oleh Badan Pemusyawaratan Desa dan Camat Salo sudah melakukan sosialisasi terhadap peraturan bupati tersebut. Melihat dari keterangan dari Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa tidak berjalan seiringan dalam hal pelaksanaan musyawarah desa ini disebabkan kepala desa di Desa Sipungguk ingin menguasai secara penuh seluruh yang ada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
2. Kendala dalam mekanisme penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Desa Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Pembangunan Desa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten

Kampar adalah:

1. Pemerintahan Desa Sipungguk ingin menguasai seluruh anggaran Dana Desa yang ada.
2. Tidak mengetahui akan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 63 Tahun 2019 yang terdapat pada Pasal 23.
3. Tidak adanya anggaran yang diberikan dalam melaksanakan musyawarah desa.
4. Kurangnya komunikasi antara Pemerintahan Desa Sipungguk dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan hal diatas maka tidak sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Desa Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa pada Pasal 23 yang berbunyi “(1) BPD menyelenggarakan Musdes berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa”.

## B. Saran

Untuk terlaksananya Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Desa Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sipungguk Kecamatan salo Kabupaten Kampar sebagaimana yang



diinstruksikan oleh peraturan tersebut makasetelah melakukan penelitian penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintahan Daerah dalam hal ini pihak Kecamatan Salo agar memberikan sosialisasi kembali tentang Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Desa Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa yang bertujuan untuk terjadinya kesesuaian antara pihak kepala desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya masing masing.
2. Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja yang ada didesa seharusnya mampu bekerja sama dengan baik dan dalam pembangunan desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa boleh menggunakan 30% dan desa (DD) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk dikembangkan agar Pendapatan Aset Desa (PAD) dapat digunakan sebaiknya bagi masyarakat yang ada diDesa Sipugguk Kecamatan salo Kabupaten Kampar.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abu Samah, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016).
- Adisamita, Rahardjo, *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*, (Yogyakarta, graha ilmu, 2006).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986).
- C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah* (Jakarta, Sinar Grafika, 2000).
- H. R. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*.
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011).
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013)
- Montorio, Josef Mario, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016).
- N i"Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 2011).
- Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sudi Fahmi, *Konsistensi Hukum antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta, Total Media, 2009).
- Syaukani Dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahjudin nurman, *Strategi pembangunan daerah*, (Jakarta, Pt.Raja grafindo persada, cetak ke-1, 2015).

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranparansi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 ayat 9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permuyawaran Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Desa.

## C. INTERNET

<https://pelatihanadministrasiperkantoran.blogspot.Com/2019/10/tugas-staff-administrasi-bpd-terkini.html>, diakses pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 20.41 WIB





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR"* yang ditulis oleh :

Nama : **M. ANDRE PRATAMA**  
 NIM : 11627104048  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 September 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQSAH**

Ketua  
**Dr. H. Hajar, M,Ag**

Sekretaris  
**H. Henrizal Hadi, Lc, M.A**

Penguji I  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis, SH, MH**

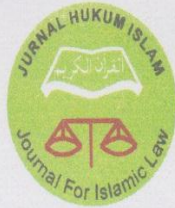
Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. ANDRE PRATAMA

NIM : 11627104048

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul : *Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar*

Pembimbing : Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Juli 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3198/2020  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Mei 2020

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. Andre pratama  
NIM : 11627104048  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa sipungguk

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: Mekanisme penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawara desa berdasarkan  
peraturan bupati kampar nomor 63 tahun 2019 tentang penyusunan teknis perencanaan  
pembangunan desa didesa sipungguk kecamatan salo kabupaten kampar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 0058

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KANTOR KEPALA DESA SIPUNGGUK  
KECAMATAN SALO**

JL. TUAN SAID NO. 02 DESA SIPUNGGUK

KODE POS 28451

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 293 / SK / DS-SP/ 208

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABU BAKAR,SE**

Jabatan : **KEPALA DESA**

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : **M. ANDRE PRAMA**

NIM : 11627104048

JURUSAN/PRODI : **ILMU HUKUM**

FAKULTAS : **SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

JUDUL PENELITIAN : **MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI KAMPAR NO 63 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIPUNGGUK  
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

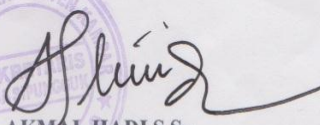
Benar ia Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru seperti yang tersebut diatas dan Benar telah melakukan Penelitian di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di penggunaan seperlunya.

Dikeluarkan di : SIPUNGGUK

Pada Tanggal : 08 JUNI 2020

An **KEPALA DESA SIPUNGGUK**

SEKDES

  
**AKMAL HADI S.Sy**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
**BANGKINANG KOTA**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2020/409

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/33344 tanggal 24 Juni 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama             | : <b>M. ANDRE PRATAMA</b>   |
| 2. NIM              | : 11627104048   |
| 3. Universitas      | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : ILMU HUKUM  |
| 5. Jenjang          | : S1  |
| 6. Alamat           | : PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : <b>MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR</b> |
| 8. Lokasi           | : KANTOR DESA SIPUNGGUK KEC. SALO KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 30 Juni 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
 dan Karakter Bangsa,



Onnita, SE  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19661009198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Salo di Salo.
2. Kepala Desa Sipungguk di Salo.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/33344  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3198/2020 Tanggal 8 Mei 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

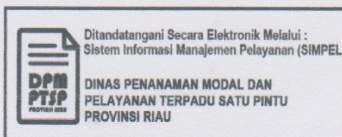
- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : M. ANDRE PRATAMA  |
| 2. NIM / KTP         | : 11627104048   |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DESA DIDESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 24 Juni 2020



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Andre Pratama. Lahir di Bangkinang 20 September 1997, penulis adalah anak pertama dari pasangan bapak Heri Indra, SH dan Rosydiana Rasyid, A.md. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jalan Lingkar, Kelurahan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu:

1. SDN 011 Langgini Lulus Tahun 2009
2. MTS Daarun Nahdhah Bangkinang Lulus Tahun 2013
3. MA Daarun Nahdhah Bangkinang Lulus Tahun 2016
4. S1 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Lulus Tahun 2020

Pada saat jenjang S1 penulis berada di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Suarif Kasim Riau. Penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar” dan Alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS dan sekaligus mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) tepat pada tanggal 11 Agustus 2020.